

TESIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN
AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA
MASSAL



Diajukan Oleh:

HARI PRINGGO YUWONO

NIM. 2320216310065

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN

2025

**Tanggung Jawab Notraris Terhadap Penandatanganan Akta
Perjanjian Kredit Yang Dilakukan Secara Massal**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

HARI PRINGGO YUWONO

2320216310065

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN

2025

Tesis ini
telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal

PEMBIMBING



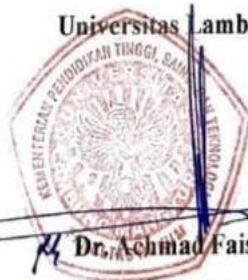
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari Pringgo Yuwono

NIM : 2320216310065

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis :Tanggung Jawab Notaris Terkait Penandatanganan Akta
Perjanjian Kredit yang Dilakakukan Secara Massal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Hari Pringgo Yuwono

NIM. 2320216310065



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

HARI PRINGGO YUWONO

2320216310065

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

20 %

Banjarmasin, 17 September 2025

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL

Oleh :

Hari Pringgo Yuwono¹, Anang Shophan Tornado²

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam mendokumentasikan perbuatan hukum, termasuk dalam transaksi kredit di sektor perbankan. Dalam praktiknya, efisiensi operasional lembaga keuangan mendorong terjadinya penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal, khususnya pada jenis kredit konsumtif seperti KPR, KUR, dan KTA. Meskipun memberikan keuntungan dari sisi efisiensi waktu dan biaya, praktik ini berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian dan aturan formil pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Penelitian ini mengkaji dua fokus utama: pertama, apakah praktik penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal diperbolehkan menurut ketentuan UUJN; dan kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap praktik tersebut ditinjau dari aspek hukum administratif, perdata, dan pidana. Melalui pendekatan hukum normatif dan konseptual, disimpulkan bahwa praktik penandatanganan secara massal diperbolehkan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta oleh notaris, serta adanya paraf dan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan sah. Ketidakhadiran notaris saat para pihak menandatangani akta secara massal dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya diakui sebagai akta di bawah tangan.

Tanggung jawab notaris dalam konteks ini meliputi: **Administratif**, berupa sanksi dari Majelis Pengawas jika terbukti lalai; **Perdata**, bila timbul kerugian bagi para pihak akibat akta cacat formil; **Pidana**, jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas notaris secara cermat dan profesional dalam menghadapi tuntutan efisiensi lembaga keuangan, sekaligus menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Notaris harus tetap menjamin keabsahan formil dan substansi akta yang dibuatnya, guna menjaga integritas jabatan serta perlindungan hukum terhadap semua pihak.

¹ NIM 2320213610065

² Pembimbing

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL

Oleh :

Hari Pringgo Yuwono³, Anang Shophan Tornado⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Akta Perjanjian Kredit, Penandatanganan Massal, Kepastian Hukum

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Perkembangan sektor perbankan dan kebutuhan efisiensi pelayanan publik menyebabkan praktik penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal semakin umum dilakukan. Praktik ini menimbulkan kompleksitas hukum terkait kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta perjanjian kredit meskipun dilakukan secara massal. Tanggung jawab tersebut meliputi verifikasi identitas para pihak, pemahaman isi akta, kehadiran fisik penghadap, dan pemenuhan formalitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 UUJN, praktik penandatanganan massal tidak mengurangi kewajiban notaris untuk menjalankan fungsi sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum. Terdapat potensi risiko hukum yang dihadapi notaris dalam praktik penandatanganan massal, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana apabila tidak memenuhi standar prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, termasuk dalam penandatanganan secara massal, serta diperlukan penyempurnaan regulasi dan penguatan pengawasan untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi pelayanan dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

³ NIM. 2320216310065

⁴ Pembimbing

NOTARY'S RESPONSIBILITY UPON SIGNING OF LOAN AGREEMENT DEED MASS CONDUCTED

By :

Hari Pringgo Yuwono¹, Anang Shophan Tornado²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 Pages

ABSTRACT

Keywords : Notary, Responsibility, Loan Agreement Deed, Mass Signing, Legal Certainty

A Notary as public official has authority to make an authentic deed which functions to provide legal certainty, legal protection and order in the society. Development in banking sector and need for efficiency in public services have caused the practice of mass signing of loan agreement deed to become common practice. This practice brings about legal complexity related to Notary's obligation and responsibility in making sure the legality of the deed to be made. This research uses normative legal method by studying legislation, doctrine of law, and library study.

The results of the research show that a notary has significant responsibility in ensuring the legality and evidencing power of loan agreement deeds although they are conducted in mass. The said responsibility includes verification of the parties' identities, understanding of contents of the deeds, physical presence of the parties, and compliance to legal formalities as regulated in Notary Position Act (UUJN). Based on Article 16 paragraph (1) letter m and Article 44 of Notary Position Act (UUJN), the practices of mass signing do not reduce Notary's obligation to perform their function as public officials who provide legal certainty. There are potencies of legal risks faced by Notaries who practice mass signing, including administrative, civil, and criminal sanctions if they do not fulfil established standard procedures. This research concludes that the Notaries have full responsibility upon every deed they make including mass signing, and it requires the improvement of the regulations and strengthening of supervision in order to guarantee the balance between efficiency of services and legal certainty in the practices of notarial matters.



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number : 2320216310065

² Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah subhanahuwata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Banyak rintangan yang penulis hadapi selama penyusunan Tesis ini, akan tetapi penulis tidak menyerah dan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga Tesis ini bisa terselesaikan tepat waktu. Usaha yang dilakukan oleh penulis tidak dilakukan sendirian dan membutuhkan bantuan dari pihak lain yang bersangkutan dalam penulisan ini maupun jalan hidup penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang karena karunia dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Bapak Penulis Hartono, S.H., M.H. Mama Penulis Teguh Hargianti, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dorongan semangat serta doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan masa studi pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
7. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Sahabat-sahabatku Abdurrachman, Zainal Abidin, Noor Indra Musfofa dan Indra Chosy Pratama atas dukungan dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah subhanahuwata'ala. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.



Banjarmasin, 30 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hari Pringgo Yuwono', written in a cursive style.

Hari Pringgo Yuwono
NIM.2320216310065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KETERANGAN PLAGIASI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	24
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	28

BAB II PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL DALAM PERPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

A. Tinjauan umum tentang jabatan notaris dan tanggung jawab hukumnya	28
B. Konsep penghadap dalam hukum notaris.....	37
C. Analisis legalitas perjanjian kredit yang dilakukan seara massal dalam perspektif UUJN	45

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP
PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KREDIT
YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL**

- A. Landasan Hukum dan ruang lingkup pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dilakukan secara massal59
- B. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban notaris dalam praktik penandatanganan akta perjanjian kredit secara massal72
- C. Implementasi prinsip kehati-hatian dan mekanisme perlindungan hukum bagi notaris dalam penandatanganan akta perjanjian kredit yang dilakukan secara massal82

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....94
- B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA

